

PROCEEDING

**PENINGKATAN KUALITAS
LULUSAN ILMU-ILMU SOSIAL
BERDAYA SAING ASEAN**



**Munas ke-5
Forum Dekan
FISIP PTN
se-Indonesia**

Diterbitkan dalam rangka Munas ke-5
Forum Dekan FISIP PTN Se-Indonesia

PROCEEDING

“Peningkatan Kualitas Lulusan Ilmu-Ilmu Sosial Berdaya Saing ASEAN”
MUNAS ke-5 Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PTN se-Indonesia

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS

Pengarah

Maya Diah Nirwana, S.Sos, M.Si

Ketua

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP, M.Si

Sekretaris

M. Fikri AR, S.Kom, M.A

Bendahara

Siswaji S.E

Anggota

Dr. Antoni, S.Sos, M.si

Dr. Drs. Hilmy Mochtar, MS

Dr. Dra Alifulahtin Utaminingsih, MS

Seksi Kesekretariatan

Winnie Qaidah Rahmani, S.I.Kom

Adi Pradana Hidayat, A.Md

Pembantu Umum

Suriyatmojo

Budiono

Daftar Isi

Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (Indah Prabawati dan Meirinawati).....	1
Kompetensi Lulusan Ilmu Pemerintahan Sebagai Bagian dalam Pengembangan Ilmu Sosial yang Berdaya Saing Asean (Fernandes Simangunsong)	8
Profil Lulusan Ilmu-Ilmu Sosial Berdaya Saing Asean: Kini dan Nanti (Cleoputri Al Yusainy, PhD)	15
Strategi Praktis Menulis Untuk Jurnal Internasional Bereputasi (Rachmat Kriyantono, Ph.D)	19
Penguatan Kompetensi Lulusan Ilmu Ilmu Sosial Menghadapi MEA (Warsono)	36
Upaya Pembangunan SDM dan Peningkatan Kualitas Lulusan Ilmu-Ilmu Sosial Berdaya Saing Asean Melalui Program Keberbakatan(Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia) (Galih W. Pradana dan Trênda Aktiva Oktariyanda).....	43
Ideologi Patriarki: Dampaknya dalam Kehidupan Perempuan Kalimantan Tengah (Prof. Drs. Kumpiady Widen, M.A., Ph.D).....	52
Politik Lokal dalam Perspektif Teori <i>Powercube</i> dan Sosiologi Politik di Provinsi Aceh (Fauzi, S.Sos. MA dan Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A).....	64
Penguatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Ketelibatan Mahasiswa Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Untuk Mendukung Kompetensi Berdaya Saing ASEAN) (Dr. Sholih Mu'adi, SH.Msi).....	73

POLITIK LOKAL DALAM PERSPEKTIF TEORI *POWERCUBE* DAN SOSIOLOGI POLITIK DI PROVINSI ACEH

Fauzi, S.Sos. MA dan Dr. Rasyidin, S.Sos.M.A

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Provinsi Aceh dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan ketua Program Pasca Sarjana Administrasi Negara (PM-AN) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe Provinsi Aceh.

Abstrak

Partai politik lokal merupakan realisasi desentralisasi asimetris di provinsi Aceh, Hal terjadi karena adanya blue pint baru pembangunan Aceh yaitu Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di provinsi Aceh. Partai politik lokal sebagai alat penyaluran aspirasi masyarakat provinsi Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun partai politik lokal tersebut belum mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada konstituennya secara optimal dan signifikan apabila ditinjau dari perspektif sosiologi politik. Invisible power, hidden power dan shadow state sangat kuat pengaruhnya di provinsi Aceh, sehingga kinerja pemerintah belum berjalan secara optimal di provinsi, bahkan relatif memiliki kinerja yang rendah. Pemerintah daerah telah mekahirkan strong men dalam pemerintahannya, apabila maih berjalan seperti desentralisasi asimetris menjadi pengahalan dalam manajemen pemerintah daerah khususnya di provinsi Aceh.

Kata kunci: *Partai politik lokal, invisibel power dan hidden power*

I. Pendahuluan

Partai politik lokal merupakan buah dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang merupakan blue print terbaru pembangunan di provinsi Aceh. MoU tersebut telah membidani lahirnya Undang-undang Nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA). Dalam UU PA tersebut pada pasal 78 memiliki tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum adalah untuk mewujudkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sedangkan tujuan khusus meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik local dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Partai politik di provinsi Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi ini, dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

Sementara, kekhawatiran atas munculnya partai politik lokal sebagai ajang untuk melepaskan diri dari Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Hikmahanto Juwana pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Hikmahanto¹ menyebutkan dua kemungkinan buruk yang patut diantisipasi oleh pemerintah. *Pertama* Perjanjian Perdamaian Helsinki menutup kemungkinan bagi para pimpinan Gerakan Aceh Merdeka untuk menuntut kemerdekaan Aceh dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergabungnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu butir terpenting dari perjanjian Helsinki. *Kedua*, kemungkinan partai politik lokal yang dipimpin oleh mantan tokoh GAM untuk meraih kemenangan dalam pemilu tahun 2009 di Provinsi Aceh adalah tidak begitu besar karena cara-cara bersenjata telah merugikan rakyat Aceh. Dua kemungkinan tersebut dikhawatirkan akan berujung pada skenario yang sama yaitu begitu partai politik lokal berkuasa di Aceh, tiba-tiba mereka minta pisah dari NKRI. Semangat membangun rakyat Aceh berdasarkan otonomi khusus merupakan keinginan mayoritas rakyat Aceh yang sebenarnya juga diinginkan oleh para mantan petinggi GAM. Perjanjian Helsinki merupakan sikap banting setir para petinggi GAM dalam usaha memajukan rakyat Aceh.

Partai politik lokal adalah partai politik yang hanya ada di tingkat daerah (Propinsi, Kabupaten atau Kota). Partai lokal tidak mempunyai pengurus ditingkat nasional karena ruang lingkungannya hanya terbatas pada satu atau beberapa daerah. Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hanya mengakui adanya partai politik Nasional dan tidak mengakui partai politik lokal.

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat Aceh. Bisa saja ada partai politik yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena hanya sebegitu kemampuannya. Atau partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminat mengajukan calon dalam pemilu ditingkat lokal (bahkan mungkin hanya disatu propinsi). Konsep partai politik lokal akan dapat menampung aspirasi tersebut.

Alasan lain yang digunakan untuk melarang partai politik lokal adalah kemungkinan banyaknya jumlah partai politik di Indonesia. Memang tidak dapat disangka bahwa jumlah partai politik bertambah banyak, namun partai politik lokal hanya ada ditingkat lokal sehingga partai politik lokal yang ada disebuah propinsi belum tentu ada dipropinsi lain. Jadi secara nasional memang jumlah partai besar, namun dapat dilihat pada tingkat propinsi, jumlah partai adalah tidak begitu besar. Bisa saja partai nasional tidak berkembang didaerah tertentu karena tidak bisa bersaing dengan partai politik nasional

II. Landasan Teori

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

2.1. Partai Politik Lokal

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru.

¹ Dosen Fakultas Hukum dan Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta.

Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955. contohnya adalah Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula Grinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.²

Partai politik merupakan instrument penting dalam mewujudkan demokrasi disebuah Negara, apabila tidak ada partai politik maka Negara tersebut tidak dikategorikan dalam Negara yang menganut system politik demokrasi. Partai politik local adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warganegara Indonesia yang berdomisi di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/wakil walikota.³

Partai politik local dalam territorial yang mikro atau dalam ruang regional ini berarti dalam lingkungan wilayah atau daerah. Dengan demikian aspek dan gerakan politik local adalah regionalisasi. Dalam konteks politik regionalisasi merupakan politik daerah dengan mengacu kepada wilayah administrative.⁴ Partai politik local (*state party, regional party atau local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional)⁵

Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memberikan pengertian Partai politik local adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.⁶

2.2. Teori Powercube

Teori powercube ini berasal dari John Gaventa mereka menafsirkan sebagai teori panggung (dramaturgi) dari pendapat Ervin Goffman. Teori ini dapat dibagikan dalam dua golongan, *pertama* dapat menganalisis teori politkn local dalam wacana politik kontemporer. *Kedua*, secara paradigmatic teori ini sebuah upaya pembaharuan bahkan melampaui paradigm lama dalam ilmu-ilmu social politik. Menurut John Gaventab teori powercube (kubus kekuasaan) memandang kekuasaan mengarah kepada aspek yang lebih luas yaitu aspek decision making dan aspek non decision making. Teori ini dapat dipergunakan sebagai alat analisis politik dan kekuasaan yang terbaru, lahirnya teori ini karena kekuasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga dengan kekuasaan tersebut

²Edwin Yustian Driyartana. 2010. Kedudukan Partai Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam ditinjau dari azaz Demokrasi. Semarang. Skripsi. Tidak dipublikasikan.

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta : Tamita Utama, halaman : 6.

⁴Halim, Abdul. 2014. *Politik Lokal, Pola Aktor dan alur dramatikalnya (Perspektif teori powercube, modal dan panggung*. Yogyakarta : LP2B. halaman 8 – 13.

⁵Ahmad Farhan Hamid. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta : Kemitraan. Halaman 87

⁶Qanun Aceh. Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta Pemilihan Umum DPRA dan DPRK.

munculnya berbagai persoalan baik politik maupun social.⁷ Berdasarkan teori powercube ini secara umum, kekuasaan difahami sebagai control seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau sekelompok orang lain.

Menurut John Gaventa teori powercube adalah sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis tiga dimensi kekuasaan yaitu *level, ruang dan bentuk* dan yang berhubungan internal antara tiga unsure tersebut. Level, ruang dan bentuk kekuasaan adalah dimensi-dimensi kekuasaan yang menjadi fokus kajian powercube.⁸ Ketiga dimensi kekuasaan tersebut memiliki arti sebagai berikut :

1. Dimensi level yang terdiri dari tingkat local, nasional dan internasional.
2. Dimensi ruang adalah ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan.
3. Dimensi bentuk yang terdiri dari bentuk yang nampak dilihat (*visible*), bentuk yang tersembunyi (*hidden*) dan bentuk yang tidak dapat dilihat (*invisible*).

Bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible forms of Power*) merupakan wujud kontestasi kepentingan yang dapat dilihat dalam ruang public atau lembaga pembuat kebijakan, partai politik atau organisasi-organisasi massa lain yang merumuskan kebijakan public. Kekuasaan yang tersembunyi merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi/individu/golongan, kekuasaan ini sebagai alat untuk mempertahankan status quo dalam sebuah daerah maupun Negara. Kekuasaan yang tidak terlihat (*Hidden power*) pada dasarnya kelanjuta dari kekuasaan tersembunyi (*Hidden Power*). Akan tetapi kedua kekuasaan ini memiliki perbedaan, Di bawah pengaruh *hidden power* kesadaran masyarakat masih mungkin muncul untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi. Namun dibawah *invisible power* masyarakat tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut karena mereka telah terbius dengan nilai-nilai atau ideologi penguasa.⁹

2.3. Sosiologi Politik

Istilah sosiologi politik berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik atau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Konsep lain sebagai objek studi politik adalah negara,. Oleh para ahli sosiologi, sosiologi politik didefinisikan sebagai cabang atau spesialisasi dari sosiologi. Jadi paling kurang mempunyai dua pandangan tentang sosiologi politik yaitu studi tentang negara dan dan kekuasaan. Namun disamping itu ada juga tafsiran mengenai sosiologi politik secara umum.

Sosiologi politik sebagai Ilmu Negara. Konsep ini mempergunakan kata “politik” dalam konotasi yang biasa. Yaitu berhubungan dengan negara. Praktisnya ada dua arti : negara bangsa dan negara pemerintah. Sosiologi sebagai ilmu tentang kekuasaan. Konsep yang lebih modern menganggap bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintah, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat

⁷ Halim, Abdul, 2014. *Politik Lokal pola actor dan dramatikalnya*. Yogyakarta : LP2B (Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa)

⁸ *ibid*

⁹ Lihat IDS, Power Pack.... Understanding Power Pack for social Change.... Halaman 12.

nasional. Sosiologi politik adalah sebuah penyelidikan antara masalah-masalah yang berkesinambungan antara masyarakat dan politik. Konsep sosiologi politik menyangkut empat konsep yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Peran sosiologi politik adalah sebagai kajian yang bersifat implisit. Dalam pembahasannya terdapat nilai-nilai yang dapat dikaji dalam keterkaitan system politik, tetapi tidak terdapat kajian ideologis didalamnya. Sosiologi politik dipandang sebagai ilmu Negara yang melibatkan urusan kenegaraan dan suatu masyarakat.¹⁰

Sosiologi politik memfokuskan perhatiannya pada pengkajian mengenai bagaimana pengaruh masyarakat terhadap norma-norma rezim, juga menganalisis kondisi-kondisi social yang mungkin terwujud dalam sebuah Negara yang kondisi demokrasi politik yang stabil. Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya dalam masyarakat nasional, juga berlaku untuk masyarakat local maupun masyarakat internasional. Ilmu ini juga menilai apa saja yang terjadi dilingkungan yang diperintah maupun yang memerintah.¹¹

Gordon Marshal menyebutkan sosiologi politik adalah focus terhadap deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang suatu Negara, suatu lembaga yang mengklaim monopoli terhadap legitimasi penggunaan kekuatan terhadap suatu wilayah di masyarakat. Sementara ilmu politik terutama membahas dengan mesin pemerintahan, mekanisme administrasi public, dan bidang politik formal pada pemilihan umum, opini public dan perilaku politik¹².

Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dengan menganalisa dokumen, buku dan sumber bacaan lainnya yang ada hubungan dengan persoalan yang diteliti, metode ini dikenal dengan *Content Analisis*.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Politik local yang telah dijalankan di provinsi Aceh merupakan buah dari *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki secara umum telah berfungsi untuk menyahuti suara masyarakat Aceh. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam MoU Helsinki tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR R.I) membuat suatu rancangan undang-undang pemerintahan Aceh yang baru, yang memuat butir-butir kesepakatan yang telah dicapai dalam perundingan tersebut termasuk dalam pengaturan mengenai partai politik lokal di Aceh. Setelah berdiskusi dan membicarakan dalam waktu yang cukup alot, akhirnya mendapatkan kesepakatan dari sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat secara aklamasi. Rancangan Undang-Undang itu kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11

¹⁰<http://maulidahayati.blogspot.com/p/sosiologi-politik.html>

¹¹Rafael Raga Maran. 1999. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta, Halaman. 25

¹²<http://widyasujarwati.blogspot.com/2013/06/konsep-dan-pengertian-sosiologi-politik.html>

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Ada tujuh topik penting yang telah dimuat dalam UU PA ini sebagai perintah dari MoU Helsinki. Ketujuh hal tersebut adalah tentang pemerintahan Aceh, legislatif Aceh, partai politik lokal, lembaga pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh, lembaga wali Nangroe, pemilihan kepala pemerintahan Aceh dan penyelenggaraan pemilihan umum, dan ekonomi dan keuangan.

Partai politik local ini merupakan turunan dari UU PA khususnya dalam bidang politik, namun partai politik local pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2009 mendapat dukungan dari masyarakat Aceh kurang lebih 75 persen. Keberadaan Partai politik local di provinsi Aceh dalam pandangan *powercube* di dukung oleh *invisible* dan *hidden power* yang cukup signifikan, Partai politik local sebgaiian besar didukung oleh para kombatan Gerakan Aceh Medeka (GAM) serta masyarakat Aceh pada *grass root*. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pada PILKADA dan PEMILU tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dalam memperoleh suara.

Penurunan hasil perolehan suara di masyarakat Aceh pada kedua memontum tersebut pada tahun 2014, tidak lain karena partai politik local Aceh belum mampu menangkap sinyal politik secara baik, masyarakat telah memberikan peluang kepada partai politik local ini, namun peluang tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dalam menyahuti suara masyarakat atau konstituennya. Di samping itu fungsi partai politik belum dapat dijalankan sebagaimana amanat undang-undang pemerintah Aceh. Salah satu diantaranya tidak ada *affirmative action*¹³ tentang pendidikan politik kepada seluruh masyarakat Aceh atau konstituennya.

Penelitian juga menemukan *hidden power* dalam teori *powercube* masih kuat dalam mempengaruhi masyarakat, sehingga tidak mau dikritik atau disarankan untuk menuju ke arah yang lebih realistis, masih tergiur dengan janji-janji politik yang tidak rasional. Di samping itu juga ditemukan pengaruh kualitatif *shadow state*¹⁴ masih kuat dan diterima oleh masyarakat Aceh secara signifikan. Peran partai politik lokal semakin memperkuat posisi *shadow state* yang melahirkan *strong men* di provinsi Aceh, *strong men* tersebut bukan berdasarkan skill dan kompetensi, namun berdasarkan *approach personality* dari kelompok-kelompok tertentu (*invisible power*).

¹³ *Affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ia merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan serta tidak menimbulkan deskriminatif. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan Undang-Undang (We are Scolty, Vol 2 Tahun 2002).

¹⁴ *Shadow State* di Indonesia menghadirkan *local strongmen* yakni Tuan Besar di provinsi Aceh maupun di tingkat kabupaten/kota dimana mereka ini memiliki jaringan bisnis yang kuat yang melebihi kapasitas daerah serta memiliki beberapa kedekatan – kedekatan personal dengan politisi, birokrat, militer, polisi, serta kelompok-kelompok tertentu yang dapat berpengaruh besar dari segi menjalankan dan bahkan pada saat merumuskan kebijakan daerah terutama kebijakan di bidang manajemen pemerintahan daerah.

Hasil penelitian yang didasarkan kepada sosiologi politik juga tidak jauh berbeda dengan analisis partai politik lokal berdasar *powercube*, mengkaji politik berdasarkan *visible power*, *hidden power* dan *invisible power*. Sosiologi politik mengkaji dan menganalisis partai politik lokal yang berdasarkan interaksi perilaku politik dan perilaku sosial di provinsi Aceh. Perilaku politik yang dilahirkan oleh partai politik lokal dapat dilihat kinerja birokrat daerah dalam mengurus daerah yang belum optimal. Hubungan antar birokrat dan pimpinan daerah yang kurang harmonis, sehingga membingungkan masyarakat. Kepentingan masyarakat belum bisa dikelola dengan baik, indikatornya bisa dilihat dengan penolakan-penolakan kebijakan oleh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa.

Perilaku politik yang tidak prima juga telah mempengaruhi *capability ekstraktif* pemerintah provinsi Aceh sekarang ini. Apabila pemerintah daerah yang tidak berkemampuan mengeksplor sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal, maka yang terjadi adalah penempatan pegawai tidak sesuai dengan kaedah atau rumusan yang berlaku yaitu *the right man on the the right job or please*. Akhirnya akan berpengaruh kepada kinerja pemerintah Aceh, ini menjadi persoalan yang sangat penting untuk diatasi (*visible power*). Di lain pihak kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh juga mengalami kemunduran yang signifikan. Seperti berkurangnya bahan baku untuk industri-industri yang ada di provinsi Aceh, dengan sangat menyesal satu-persatu industri tersebut sudah gulung tikar. Akhirnya pertumbuhan ekonomi masyarakat juga terganggu.

Partai politik lokal di Aceh merupakan indikator telah terbentuknya *desentralisasi asimetris*¹⁵ sejati di provinsi ini. Desentralisasi ini merupakan strategi politik pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Aceh, sehingga tidak terjadi disintegra bangsa sekaligus mempertahankan NKRI secara utuk dan konsisten. Sejauh kesesuaian itu dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak melahirkan strong men yang mempengaruhi manajemen pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partai politik lokal masih mengikuti *insible power* dan *hidden power* sehingga kinerjanya belum bisa dioptimalkan dengan baik, maka kinerja pemerintah daerah pun belum bisa ditingkatkan secara optimal.
2. Partai politik lokal di provinsi Aceh belum bisa menjalankan fungsinya secara signifikan baik yang berkaitan dengan komunikasi politik maupun rekrutmen

¹⁵ desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemeritahan diluar ketentuan umum dan khusus. sedangkan di level kabupaten/kota sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Desentralisasi asimetris dapat menjadi trobosan akan kebuntuan mekanisme formal.

politik, akhir sasaran partai politik untuk mencerdaskan konsituennya belum dapat dijalankan secara maksimal.

3. Partai politik lokal telah melahirkan *strong men* di provinsi Aceh dengan tidak memperhatikan skill dan kompetensi, sehingga pelayanan publik dan manajemen publik belum berkinerja optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran untuk pemerintah provinsi Aceh adalah :

1. Partai politik lokal di provinsi Aceh harus memiliki marwah yang kuat sehingga mampu memberikan pendidikan dalam manajemen pemerintah Aceh secara signifikan, pada akhirnya pemerintah Aceh akan berkinerja baik, efisien dan efektif.
2. Fungsi partai politik lokal harus ditingkatkan fungsinya sehingga pendidikan politik kepala masyarakat sebagai konstituennya dapat dijalankan secara berkelanjutan sebagaimana peran partai politik.
3. Pemerintah Aceh dalam menjalankan perannya harus berfokus kepada kompetensi dan skill dalam merekrut pegawainya, dan *strong men* di dalamnya perlu diminimalisir secara konsisten.